

# **DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG**

## **2018**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SOPPENG**

<https://soppengkab.bps.go.id>

**DATA DAN INFORMASI  
KEMISKINAN  
KABUPATEN SOPPENG  
2018**

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

**DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN  
KABUPATEN SOPPENG  
2018**

**Nomor Publikasi** : 73120.1933  
**Katalog BPS** : 3205014.7312

**Ukuran** : 17,6 x 25 cm  
**Jumlah Halaman** : x + 60 halaman

**Pembina** : Ir. H. Rustan  
**Pengarah** : Sukri, SE.

**Penyusun** : Muhammad Zaky Nafi', S.ST  
**Gambar Kulit** : Muhammad Zaky Nafi', S.ST  
**Lay Out** : Muhammad Zaky Nafi', S.ST

**Diterbitkan oleh :**  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng**

**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG**  
**Jl. Salotungo, Watansoppeng, 90812**  
**Telp: (0484) 21060, Fax: (0484) 23377**  
**Website: <http://soppengkab.bps.go.id>**  
**Email: [soppengkab@bps.go.id](mailto:soppengkab@bps.go.id)**

<https://soppengkab.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng 2018 merupakan publikasi pertama yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Soppeng khusus membahas mengenai kemiskinan di Kabupaten Soppeng. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Soppeng.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Watansoppeng, Desember 2019  
BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SOPPENG  
Kepala,

**IR. H. RUSTAN**  
NIP: 19661215 199301 1 001

<https://soppengkab.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Penulisan.....	4
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II     KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN</b>	9
2.1 Metodologi Penghitungan Kemiskinan.....	9
2.1.1 Konsep.....	9
2.1.2 Sumber Data.....	10
2.1.3 Metode Penghitungan Garis Kemiskinan.....	10
2.2 Indikator Kemiskinan.....	11
2.3 Konsep dan Definisi Indkator lain terkait kemiskinan .....	13
2.3.1 Pendidikan .....	14
2.3.2 Ketenagakerjaan.....	15
2.3.3 Sektor Ekonomi.....	15

	Halaman
2.3.4 Kesehatan.....	15
2.3.5 Fasilitas Perumahan.....	17
2.3.6 Program Pemerintah.....	17
<b>BAB III      KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN</b>	<b>21</b>
<b>              SOPPENG</b>	
3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....	21
3.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Kemiskinan.....	21
3.1.2 Garis Kemiskinan.....	23
3.1.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	23
3.2 Karakteristik Penduduk Miskin.....	25
3.2.1 Pendidikan.....	25
3.2.2 Ketenagakerjaan.....	30
3.2.3 Kesehatan.....	34
3.2.4 Pengeluaran Perkapita Perbulan.....	36
3.2.5 Fasilitas Perumahan.....	39
3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan.....	41
<b>BAB IV      PENUTUP</b>	<b>47</b>
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, $P_1$ , $P_2$ , dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018	54
Tabel 2	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018	55
Tabel 3	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Sektor Bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018	56
Tabel 4	Persentase Perempuan berstatus Miskin Usia 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB dan Balita di Rumah Tangga Miskin yang telah Diimunisasi di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017	57
Tabel 5	Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018	58
Tabel 6	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018	59
Tabel 7	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-rata Jumlah Beras Raskin dan Rata-rata Harga Pembelian Raskin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018	60

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	22
Gambar 1.2	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Buru Selatan, 2014-2018	23
Gambar 1.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Soppeng, 2014-2018	25
Gambar 2.1	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	27
Gambar 2.2	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	28
Gambar 2.3	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	29
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	33
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	34
Gambar 4	Persentase Perempuan Berstatus Miskin Usia 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	36
Gambar 5	Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	38
Gambar 6	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	40
Gambar 7.1	Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	42

	Halaman	
Gambar 7.2	Persentase Rata-rata Jumlah Beras Rasin yang Dibeli oleh Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	43
Gambar 7.3	Persentase Rata-rata Harga Beras Raskin yang Dibeli oleh Rumah tangga Miskin di Kabupaten Soppeng, 2014-2018	44

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

A cartoon illustration of a man with a beard and a purple shirt, looking thoughtful. A large blue thought bubble is above him, containing the text 'Tahukah Kamu?'.

Tahukah Kamu?

Pada tahun 2018,  
**7,50%** dari penduduk  
**Kabupaten Soppeng**  
tercatat sebagai  
**penduduk miskin**

\*Garis kemiskinan Kab. Soppeng tahun 2018 sebesar  
Rp 253.457,00 per kapita per bulan

Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki  
rata-rata pengeluaran perkapita per bulan  
dibawah Garis Kemiskinan

<https://soppengkab.bps.go.id>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Di tengah kekayaan potensi alamnya yang melimpah, ternyata Indonesia masih dihadapkan dengan sebuah masalah klasik, yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun dan menjadi masalah yang belum terselesaikan saat ini. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Disinilah terdapat peran BPS, yang telah dipercaya oleh pemerintah untuk mengumpulkan data-data kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Soppeng. Data kemiskinan yang lengkap dan akurat akan memudahkan pemerintah dalam membuat perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di daerahnya. Oleh karena itu, dalam rangka menyediakan data-data mengenai kemiskinan di Kabupaten Soppeng, maka BPS Kabupaten Soppeng menerbitkan publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun 2018. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pemerintah Kabupaten Soppeng dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2014-2018.
- b. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2014-2018.

## **1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan**

Ruang lingkup analisis publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan kabupaten/kota. Sumber data yang digunakan adalah data yang dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014-2018. Tingkat kemiskinan yang dianalisis merupakan kondisi bulan September tahun 2014 yang didapatkan dari data Susenas Modul Konsumsi Gabungan Triwulan I-IV. Sedangkan untuk tahun 2016-2018, tingkat kemiskinan yang dianalisis merupakan kondisi bulan Maret yang didapatkan dari data Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran Semester I (Maret).

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan, serta sistematika penulisan.

## BAB II KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN

Bab ini berisi metodologi penghitungan kemiskinan, indikator kemiskinan, serta beberapa konsep dan definisi.

## BAB III KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN SOPPENG

Bab ini menjelaskan perkembangan tingkat kemiskinan, karakteristik penduduk miskin, dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Soppeng.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini, akan dijelaskan kembali poin-poin penting mengenai fenomena kemiskinan di Kabupaten Soppeng, sehingga diharapkan dapat menjadi gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator-indikator kemiskinan yang ada di Kabupaten Soppeng.

Semua indikator di atas diulas serta dilengkapi dengan tabel dan grafik sehingga memudahkan para konsumen data dalam memahami kondisi kemiskinan yang ada.

<https://soppengkab.bps.go.id>



**0,79%**

Pada tahun 2018,  
jumlah penduduk  
miskin **Soppeng**  
turun sebesar **0,79%**  
disbanding tahun 2017  
yaitu dari **18.763** jiwa  
menjadi **16.995** jiwa  
pada tahun 2018

<https://soppengkab.bps.go.id>

## BAB II

# Konsep Penghitungan Kemiskinan

### 2.1 Metodologi Penghitungan Kemiskinan

#### 2.1.1 Konsep

- Kemiskinan

Secara umum, jenis-jenis kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu **kemiskinan absolut** dan **kemiskinan relatif**. Kemiskinan absolut diartikan sebagai deprivasi atau kekurangan atas kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak, termasuk makanan, air bersih, sanitasi, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relative diartikan sebagai ketimpangan ekonomi, yang diukur dengan kelas pendapatan, antara kelompok masyarakat dengan kelas pendapatan terendah, menengah, dan tertinggi (Irawan, et al., 2017).

- Garis Kemiskinan

Sebelum menghitung jumlah penduduk miskin, maka langkah pertama adalah menentukan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

### **2.1.2 Sumber Data**

Sumber data utama yang dipakai adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pada periode tahun 2014-2015, data Susenas yang digunakan adalah Susenas modul konsumsi triwulan I, II, III dan IV. Khusus tahun 2014, menggunakan data Susenas modul konsumsi triwulan I, II, III, tahun 2014. Untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota maka dilakukan penggabungan keempat set data tersebut (triwulan I, II, III, dan IV), sehingga sampel rumah tangga cukup untuk mengestimasi kemiskinan hingga level kabupaten/kota. Pada periode selanjutnya, yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018, data yang digunakan adalah data Susenas konsumsi pengeluaran bulan Maret (semester I) yang jumlah sampelnya sudah mencukupi untuk mengestimasi kemiskinan hingga level kabupaten/kota. Sedangkan penimbang yang digunakan adalah hasil proyeksi penduduk dari data Sensus Penduduk tahun 2010.

### **2.1.3 Metode Penghitungan Garis Kemiskinan**

Tahapan dalam menghitung garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah sebagai berikut:

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara, yaitu Garis kemiskinan pada periode lalu yang diinflasi dengan inflasi umum

(IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan merupakan penjumlahan nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori.

Sedangkan garis Kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non makanan dihitung dengan menggunakan rasio pengeluaran komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2003 (SPKKD 2003), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan nilai garis kemiskinan.

## 2.2 Indikator Kemiskinan

Menurut Foster, Greer, dan Thorbecke (1984, dalam Irawan, et al., 2017), ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut, baik dengan pengukuran berbasis pendapatan maupun kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dari sisi pengeluaran, yaitu:

- *Head-Count Index* ( $P_0$ )

Persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang telah ditentukan, atau disebut tingkat insiden kemiskinan, atau *head-count index* ( $P_0$ ), Indeks  $P_0$  hanya dapat memberikan informasi mengenai proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Keterbatasan indeks  $P_0$  adalah indeks ini tidak bisa menjelaskan seberapa miskin atau sengsara para penduduk yang dikategorikan miskin tersebut.

- *Poverty Gap Index* ( $P_1$ )

Indeks ketimpangan kemiskinan, atau *poverty gap index* ( $P_1$ ), Indeks  $P_1$  adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tidak seperti indeks  $P_0$  yang hanya memberikan informasi persentase dan jumlah penduduk miskin, indeks  $P_1$  bisa mengindikasikan perubahan derajat kemiskinan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks  $P_1$ , maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Akan tetapi, indeks  $P_1$  ini masih mempunyai kekurangan, yaitu tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan (atau pengeluaran sebagai proksi pendapatan) antara penduduk miskin, sehingga tidak bisa mendeteksi keparahan kemiskinan (*poverty severity*).

- *Poverty Severity Index* ( $P_2$ )

Indeks  $P_2$  merupakan indeks yang bisa memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan (atau pengeluaran sebagai proksi pendapatan) di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ketiga indeks kemiskinan tersebut bisa dihitung dengan menggunakan rumus FGT (Foster, Greer, Thorbecke), sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan :

$z$  = garis kemiskinan

$y_i$  = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk

yang berada di bawah GK ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = banyaknya penduduk yang berada di bawah GK

$n$  = jumlah penduduk

$\alpha$  = parameter ukuran sensitivitas kemiskinan, dimana :

$\alpha = 0$ , untuk menghitung *head count index* ( $P_0$ ),

$\alpha = 1$ , untuk menghitung *poverty gap index* ( $P_1$ ),

$\alpha = 2$ , untuk menghitung *poverty severity index* ( $P_2$ ).

## 2.3 Konsep dan Definisi Indikator lain terkait kemiskinan

### 2.3.1 Sektor Pendidikan

- **Pendidikan yang ditamatkan** adalah proporsi seluruh kepala rumah tangga berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB

tertinggi yang dimiliki. Publikasi ini mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki menjadi tiga, yaitu tidak mempunyai ijazah, mempunyai ijazah SD atau SMP dan mempunyai ijazah minimal SMA khusus untuk kepala rumah tangga miskin.

- **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah proporsi seluruh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Publikasi ini hanya menyajikan angka melek huruf penduduk miskin menurut kelompok umur 15 – 24 tahun dan 15 – 55 tahun. Melek huruf yang dimaksudkan di sini adalah melek huruf latin, atau huruf arab, atau huruf lainnya.
- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi dari seluruh penduduk miskin menurut berbagai kelompok umur tertentu (misalnya: 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun) yang masih duduk di bangku sekolah. Publikasi ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang dapat digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun.

### 2.3.2 Sektor Ketenagakerjaan

- **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. Penduduk yang dicatat untuk publikasi ini khusus penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas.
- **Bekerja di sektor informal** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.

- **Bekerja di sektor formal** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama adalah berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.
- **Bekerja di sektor pertanian** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sector pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.
- **Bekerja bukan di sektor pertanian** adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selain di sektor pertanian.
- **Tidak bekerja** adalah penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan)

### 2.3.3 Sektor Ekonomi (Pengeluaran Per Kapita)

**Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan** adalah total pengeluaran perkapita perbulan untuk makanan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

### 2.3.4 Sektor Kesehatan

- **Imunisasi atau vaksinasi** adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh bayi di bawah lima tahun (balita) dengan cara disuntik atau diminum (diteteskan ke dalam mulut), dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.
- **Persentase balita yang telah diimunisasi** adalah proporsi penduduk berusia lima tahun ke bawah (balita) di rumah tangga

miskin yang setidaknya sudah mendapatkan salah satu dari imunisasi Bacillus calmette guerin (BCG); difteripertusis- tetanus (DPT); polio, campak/morbili, dan hepatitis B.

- **Pengguna alat kontrasepsi**, terdapat perbedaan konsep definisi antara tahun 2014 dan tahun 2015-2018. Untuk data tahun 2014, yang dimaksud pengguna alat kontrasepsi adalah proporsi perempuan di rumah tangga miskin berumur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin, cerai hidup, atau cerai mati dan pernah/ sedang menggunakan alat/cara KB. Sedangkan untuk tahun 2015-2018, yang dimaksud pengguna alat kontrasepsi adalah perempuan di rumah tangga miskin berumur 15-49 tahun berstatus kawin, cerai hidup, cerai mati atau pasangannya yang menggunakan alat keluarga berencana (KB) atau cara tradisional guna menunda kehamilan.

Alat KB atau cara tradisional meliputi:

- Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW
- Sterilisasi pria/vasektomi/MOP
- IUD/AKDR/spiral
- Suntikan
- Susuk KB/implan
- Pil
- Kondom pria/karet KB
- Intravag/kondom wanita/diafragma
- Metode menyusui alami
- Pantang berkala/kalender
- Lainnya

### 2.3.5 Sektor Perumahan (Fasilitas)

- **Rumah tangga pengguna air layak** adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari:
  - Air terlindung yaitu leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah  $\geq 10$  meter.
  - Air terlindung tapi jarak ke penampungan kotoran/limbah  $< 10$  meter/ air tidak sustain (air hujan)/ air tidak terlindung namun sumber mandi/cuci/dll berasal dari air terlindung.
- **Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama** adalah persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga itu sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

### 2.3.6 Program Pemerintah

**Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra)** adalah rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras miskin (Raskin)/beras sejahtera (Rastra). Program Raskin/Rastra adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.

<https://soppengkab.bps.go.id>



Pada tahun 2018,  
di Kabupaten Soppeng  
terdapat **57,70%**  
rumah tangga miskin  
yang sudah  
menggunakan  
air layak

**Rumah tangga pengguna air layak** adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari:

- Air terlindung yaitu leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah  $\geq 10$  meter.
- Air terlindung tapi jarak ke penampungan kotoran/limbah  $< 10$  meter/ air tidak sustain (air hujan)/ air tidak terlindung namun sumber mandi/cuci/dll berasal dari air terlindung.

<https://soppengkab.bps.go.id>

# BAB III

## KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG

### 3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

#### 3.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

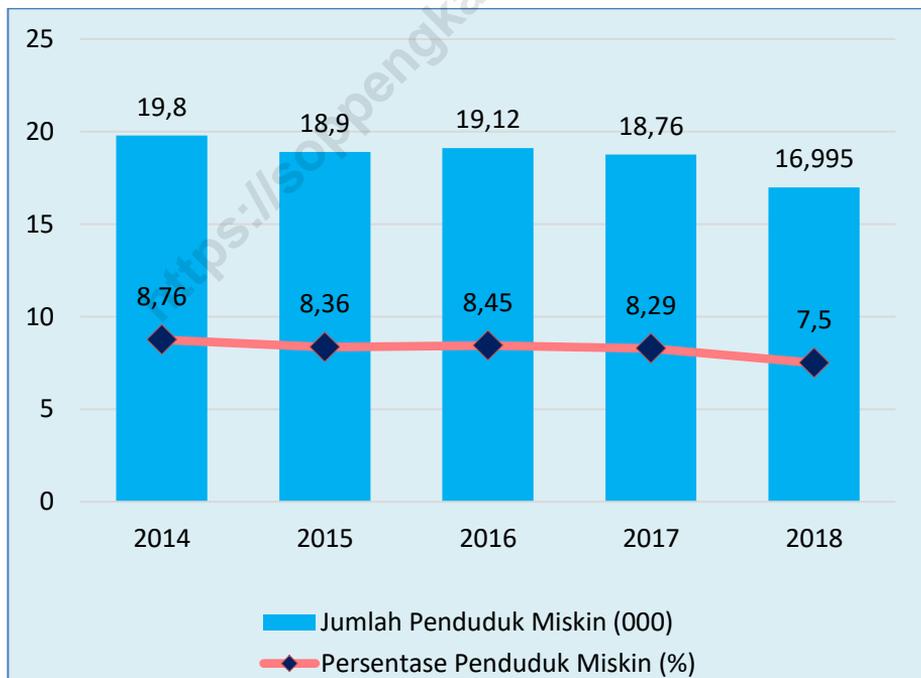
Kabupaten Soppeng adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watansoppeng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.500,00 km<sup>2</sup>. Seperti halnya kabupaten dan kota lain, Kabupaten Soppeng juga menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya adalah kemiskinan.

Fenomena kemiskinan secara umum dapat dilihat melalui beberapa indikator kemiskinan. Pertama, dengan melihat jumlah dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ( $P_0$ ). Kedua, dengan melihat rata-rata jarak antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan ( $P_1$ ). Ketiga, dengan melihat sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin ( $P_2$ ).

Pada tahun 2018, masih ada sekitar 16.995 penduduk miskin di Kabupaten Soppeng atau sekitar 7,50 persen dari total penduduk Kabupaten Soppeng. Mereka digolongkan miskin karena rata-rata pengeluaran bulanan baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan masih dibawah garis kemiskinan yang saat itu mencapai Rp 253.457,00/orang/bulan. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin, Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin nomor lima paling sedikit jika dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan lainnya. Sama halnya jika

dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin, dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Soppeng menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin paling sedikit nomor enam. (lihat Tabel 1).

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin ( $P_0$ ) Kabupaten Soppeng tahun 2014-2018. Terlihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng mempunyai kecenderungan menurun. Jika dilihat dari periode tahun 2014-2018, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 19.800 orang menjadi 16.995 orang. Pada periode tahun tersebut, persentase penduduk miskin ( $P_0$ ) juga mengalami penurunan dari 8,76 persen menjadi 7,50 persen.

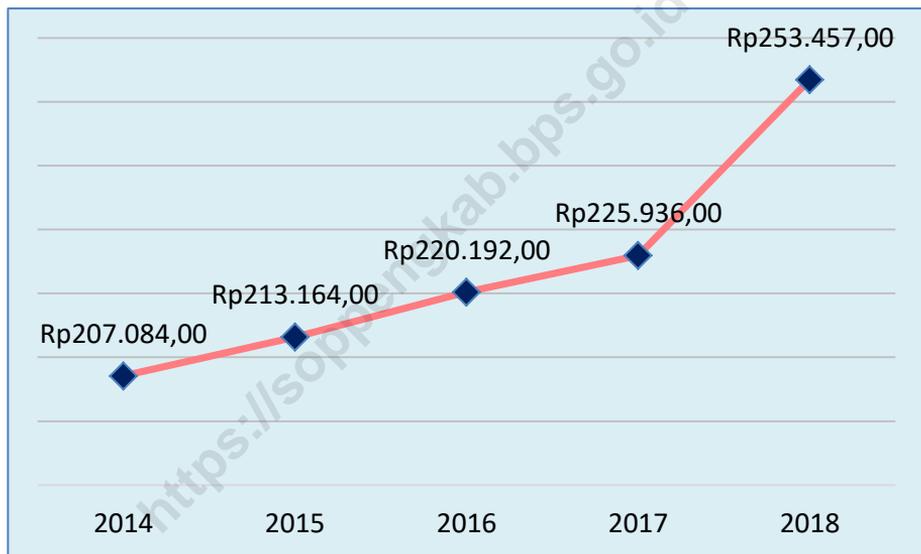


Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten dan Kota 2014-2018

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

### 3.1.2 Garis Kemiskinan

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2, perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun 2014-2018 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, garis kemiskinan Kabupaten Soppeng mencapai nilai Rp 253.457,00/orang/bulan, angka tersebut merupakan angka garis kemiskinan paling tinggi dalam lima tahun terakhir.



Gambar 1.2 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

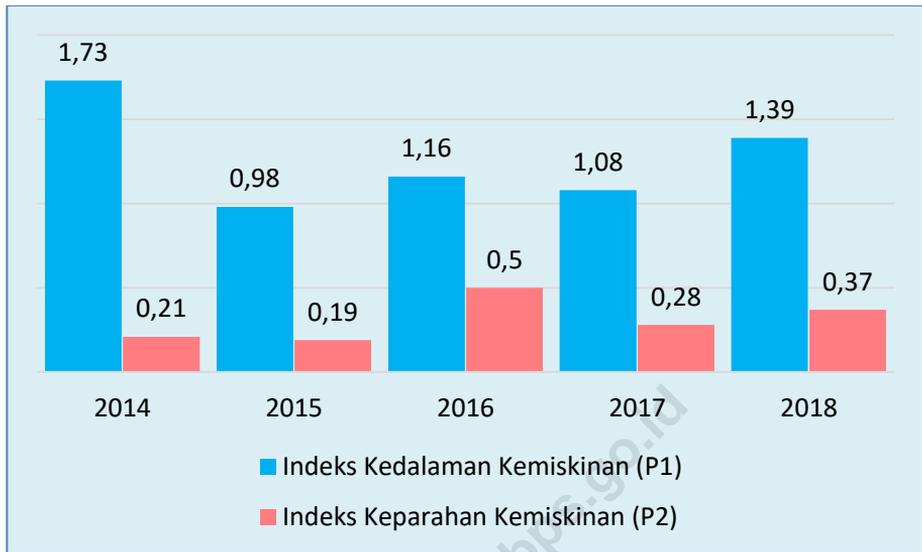
### 3.1.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indikator selanjutnya yang dapat menggambarkan kemiskinan adalah *poverty gap index* atau indeks ketimpangan kemiskinan ( $P_1$ ) dan *poverty severity index* atau indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ). Gambar 1.3 menjelaskan bahwa angka indeks ketimpangan kemiskinan Kabupaten Soppeng pada periode tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif

dan mencapai angka 1,39 persen pada tahun 2018. Ini berarti bahwa kesenjangan antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan relatif kecil, yaitu hanya sebesar 1,39 persen.

Berbeda dengan  $P_0$  yang hanya menganggap semua orang miskin sama miskinnya,  $P_1$  dapat mengukur intensitas atau kedalaman kemiskinan dengan melihat sejauh mana jarak pendapatan orang miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai  $P_1$  ini penting untuk diketahui karena dapat menjadi pertimbangan pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Semakin tinggi  $P_1$ , maka semakin jauh jarak antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan. Ini berarti pemerintah akan semakin membutuhkan usaha yang lebih untuk mengangkat mereka dari jurang kemiskinan.

Pada periode tahun 2014-2018,  $P_2$  juga menunjukkan pola yang sama dengan  $P_1$ . Walaupun sempat mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2018 nilai  $P_2$  lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai angka 0,37 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin tidak begitu timpang.



Gambar 1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) dan Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

## 3.2 Karakteristik Penduduk Miskin

### 3.2.1 Pendidikan

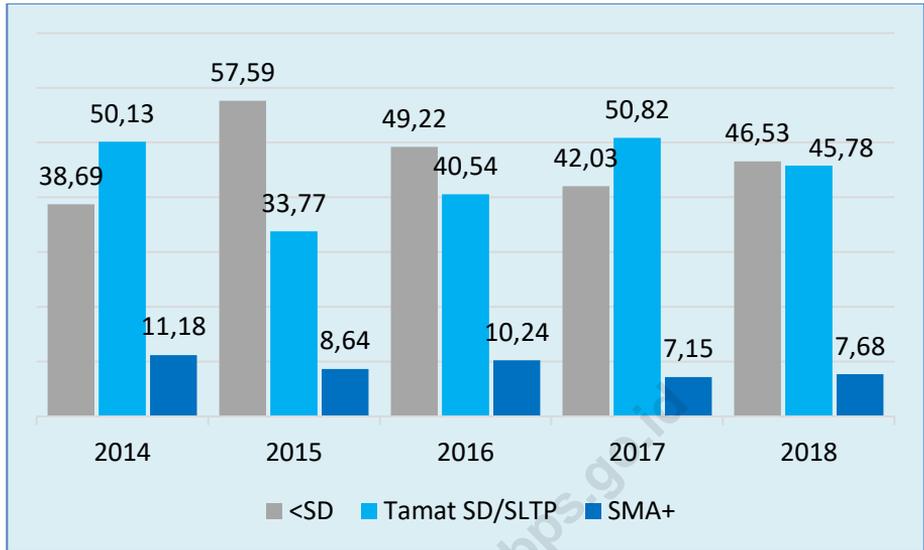
Kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Todaro (2003, dalam Cahyo, 2017) menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan suatu bangsa (masyarakat) adalah rendahnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kesempatan memperoleh pengetahuan.

Haughton dan Khander (2009) membagi faktor-faktor penyebab kemiskinan menjadi beberapa karakteristik, salah satunya adalah karakteristik sosial pada level rumah tangga dan individu. Karakteristik pendidikan, seperti tingkat pendidikan, ketersediaan pelayanan pendidikan, melek huruf, dan rata-rata lamanya sekolah penduduk dewasa di atas lima belas tahun, menjadi salah satu karakteristik sosial yang menjadi penyebab kemiskinan.

Pada tahun 2018, banyak penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng dengan tingkat Pendidikan tamat SD atau SMP, yaitu sebesar 45,78 persen. Sedangkan penduduk yang berpendidikan tidak tamat SD masih ada sebanyak 46,53 persen, dan 7,68 persen lainnya berpendidikan tamat SMA ke atas.

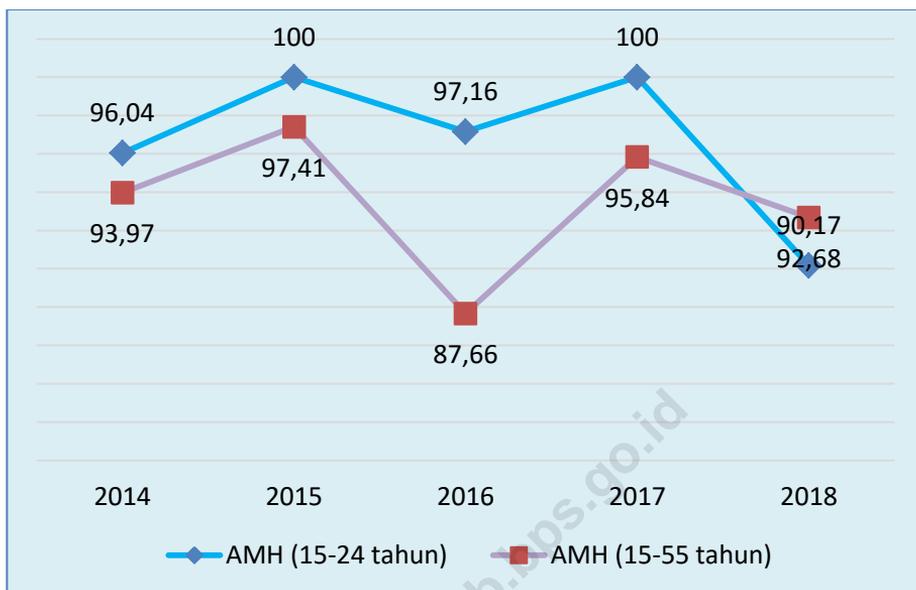
Tingkat pendidikan penduduk miskin di Kabupaten Soppeng tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD di Kabupaten Soppeng lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan minimal tamat SD di Kabupaten Soppeng menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan (lihat Tabel 2).

Pada periode tahun 2014-2018, seperti yang terlihat pada gambar 2.1, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas baik yang berpendidikan tidak tamat SD, tamat SD atau SMP, maupun minimal tamat SMA, masih fluktuatif di tiap tahunnya. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD pada tahun 2018 mencapai angka 46,53 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 42,03 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan minimal tamat SMA mengalami kenaikan pada tahun 2018 persentasenya menjadi sebesar 7,68 persen.



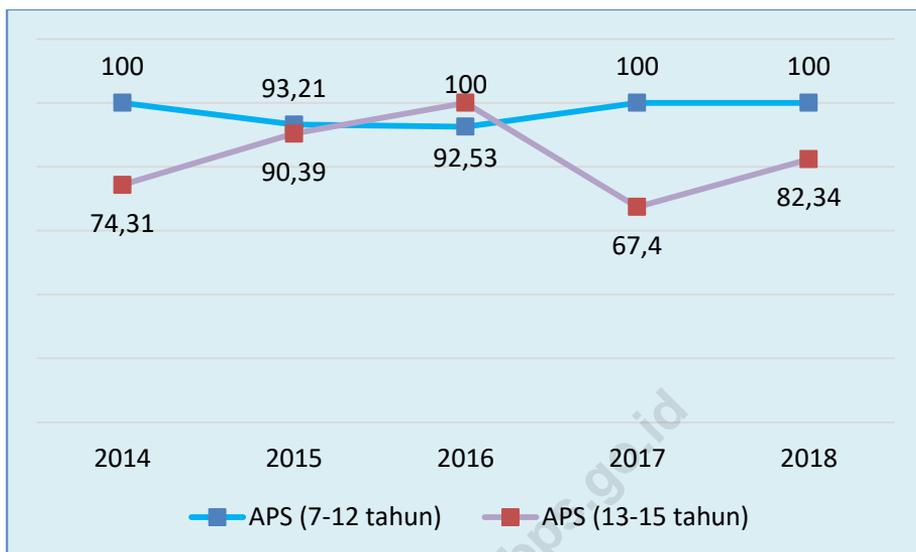
Gambar 2.1 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa tren Angka Melek Huruf (AMH) penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada periode tahun 2014-2018 terlihat masih fluktuatif, baik golongan umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun.



Gambar 2.2 Angka Melek Huruf Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

Persentase APS penduduk miskin berumur 7-12 tahun atau setara usia sekolah dasar, pada periode tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 dan 2018, persentasenya mencapai 100 persen yang berarti semua penduduk miskin yang berumur 7-12 tahun di Kabupaten Soppeng semuanya bersekolah. Begitu pula untuk penduduk miskin berumur 13-15 tahun atau setara usia Sekolah Menengah Pertama (SMP), persentase APS pada periode tahun 2018 mengalami kenaikan, meski pada periode sebelumnya sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2016, APS penduduk miskin berumur 13-15 tahun bahkan sempat mencapai angka 100 persen. Selanjutnya, pada tahun 2017, angkanya turun menjadi 67,4 persen, dan kemudian naik lagi menjadi 82,34. Ini berarti pada tahun 2018 terdapat 82,34 persen penduduk miskin berumur 13-15 tahun yang masih bersekolah.



Gambar 2.3 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

Jika dilihat dua tahun terakhir, rumah tangga miskin sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka, khususnya untuk pendidikan sekolah dasar. Bahkan persentase APS untuk golongan umur 7-12 tahun sudah mencapai 100 persen pada tahun 2017 dan 2018. Akan tetapi, ternyata masih ada selisih yang cukup besar antara persentase APS golongan umur 13-15 tahun dan APS golongan umur 7-12 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada anak berumur 7-12 tahun yang berada di rumah tangga miskin yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP/MTs. Hal ini dikarenakan masih ada desa-desa di Kabupaten Soppeng yang tidak mempunyai SMP/MTs. Jika dilihat dari data BPS Kabupaten Soppeng, pada tahun 2018 hanya ada sebanyak 38 SMP dan 31 MTs yang ada di Kabupaten Soppeng. Jumlah tersebut terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah SD/MI yang ada di Kabupaten Soppeng yang mencapai 272 sekolah. Ditambah lagi dengan

akses jalan antar desa yang masih sulit yang juga dapat menjadi alasan untuk menyekolahkan anak mereka ke SMP di desa terdekat.

Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu memperhatikan kondisi tersebut. Dalam UU. No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah perlu menyadarkan masyarakat lagi akan pentingnya program wajib belajar 9 tahun ini. Tentunya hal tersebut dibarengi dengan menambah SMP/MTs khususnya di desa-desa dengan akses jalan yang masih sulit.

Selain itu pemerintah perlu memperhatikan lagi kemampuan penduduk miskin untuk membiayai sekolah anak mereka. Karena selain kurangnya fasilitas SMP/MTs di daerahnya, alasan lain yang membuat anak dalam rumah tangga miskin tidak melanjutkan pendidikannya adalah dikarenakan masalah ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah. Sesuai dengan pasal 11 Ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Program beasiswa seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan yang lainnya, perlu direncanakan sebaik mungkin agar tepat sasaran, yaitu untuk rumah tangga miskin yang tidak bisa membiayai sekolah anaknya. Karena jika rumah tangga miskin dapat memperbaiki pendidikan anak mereka, maka peluang untuk keluar dari jurang kemiskinan akan terbuka.

### **3.2.2 Ketenagakerjaan**

Haughton dan Khander (2009) memasukkan karakteristik ekonomi pada level rumah tangga dan individu sebagai salah satu faktor penyebab

kemiskinan. Karakteristik ekonomi tersebut salah satunya adalah permasalahan ketenagakerjaan. Dian Octaviani (2001, dalam Wijayanto 2010) menyatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin.

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, penduduk miskin di Kabupaten Soppeng banyak yang bekerja di sektor informal. Hal tersebut dapat diketahui dari perbedaan antara persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal dan informal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 43,61 persen, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 12,20 persen.

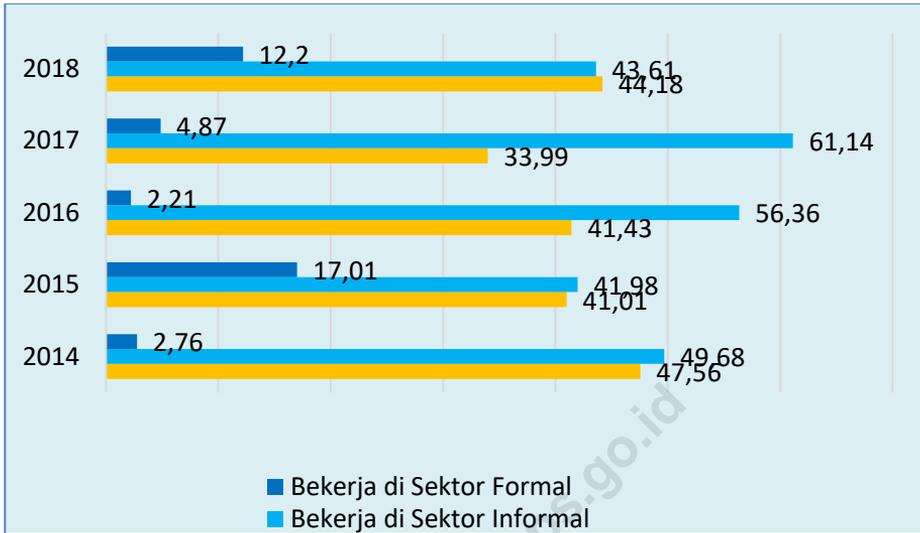
Selain itu, dapat juga diketahui bahwa penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih banyak yang bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 27,07 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, baik pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertanian lainnya. Sedangkan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja bukan di sektor pertanian ada sebanyak 28,75 persen (lihat Tabel 3).

Jika dilihat dari lima tahun terakhir sesuai Gambar 3.1, karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Soppeng umumnya masih bekerja di sektor informal daripada bekerja di sektor formal, hanya segelintir orang saja yang bekerja di sektor formal yang angkanya tidak pernah lebih dari 18 persen dari keseluruhan penduduk miskin usia 15

tahun ke atas. Di sisi lain, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja atau pengangguran dari tahun sempat fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi pada tahun 2018 angkanya naik lagi menjadi 44,18 persen.

Pada Gambar 3.1, terdapat hal yang menarik antara tren penduduk miskin yang bekerja di sektor informal dan penduduk miskin yang tidak bekerja. Keduanya mempunyai tren yang saling bertolak belakang pada beberapa tahun. Misalnya pada tahun 2016-2017, dimana persentase penduduk yang bekerja di sektor informal mengalami kenaikan, sebaliknya penduduk yang tidak bekerja mengalami penurunan. Begitu juga ketika tahun 2018, persentase penduduk yang bekerja di sektor informal mengalami kenaikan, tapi penduduk yang tidak bekerja juga mengalami penurunan.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor informal dapat menjadi alternatif pekerjaan dan dapat menampung penduduk miskin yang umumnya berpendidikan rendah dan tidak mempunyai skill yang cukup untuk bekerja di sektor formal agar tidak menganggur. Keadaan ini dapat mempunyai dampak positif mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Fenomena tersebut dapat menjadi gambaran bagi pemerintah Kabupaten Soppeng agar lebih memperhatikan nasib para pekerja sektor informal dengan cara melakukan pembinaan kegiatan usaha pekerja sektor informal agar bisa berkembang lebih baik lagi.



Gambar 3.1 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

Sesuai yang terlihat pada Gambar 3.2, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng umumnya bekerja di sektor pertanian, hanya segelintir orang saja yang bekerja bukan di sektor pertanian yang angkanya tidak pernah lebih dari 30 persen dari keseluruhan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian dari tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 27,07 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, pada tahun 2018 penduduk yang bekerja bukan di sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 27,07 persen.

Di Kabupaten Soppeng, pekerjaan di sektor pertanian umumnya masih dikerjakan sendiri maupun dibantu anggota keluarga lain yang tidak dibayar. Hal tersebut menjadikan sektor pertanian berhubungan erat dengan sektor informal. Hal tersebut tergambar dalam tren yang sama antara persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan

sektor informal pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2. Sama halnya dengan sektor informal, sektor pertanian juga mempunyai peranan dalam mengurangi angka pengangguran terbuka. Hal tersebut dikarenakan sektor pertanian di Kabupaten Soppeng sebagian besar masih dijalankan dengan tradisional sehingga bisa dikerjakan oleh orang yang berpendidikan rendah maupun orang yang belum terampil bekerja. Oleh karena itu, selain memperhatikan sektor informal, pemerintah juga perlu memperhatikan sektor pertanian.



Gambar 3.2 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja, di Soppeng Tahun 2014-2018

### 3.2.3 Kesehatan

Rumah tangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak. Karena rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi (BPS, 2008). Hal tersebut bisa terjadi karena banyak rumah tangga miskin yang belum mengetahui mengenai penggunaan alat KB. Di Kabupaten Soppeng, terdapat 62,90 persen perempuan berstatus miskin usia 15-49 tahun

yang menggunakan alat KB pada tahun 2017 masih relatif dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di provinsi Sulawesi Selatan (lihat Tabel 4).

Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu mengupayakan perubahan budaya *mindset* atau pola pikir rumah tangga miskin yang cenderung untuk ingin mempunyai anak yang banyak tanpa diimbangi dengan perbaikan ekonomi rumah tangganya. Rumah tangga miskin perlu disadarkan akan pentingnya mengontrol kelahiran anak dalam rumah tangganya. Karena jika hal ini berlangsung terus menerus, maka bukan tidak mungkin kemiskinan juga akan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Seperti kata Suryawati (2005), bahwa kemiskinan bisa muncul karena akibat nilai budaya yang dianut rumah tangga miskin itu sendiri, salah satu budaya tersebut adalah mempunyai banyak anak yang berakar dari kondisi lingkungan yang serba miskin dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Banyaknya anak yang ada di rumah tangga miskin juga berdampak pada kurangnya perhatian kesehatan dan pemenuhan gizi anak mereka. Dilihat dari tabel 3, persentase balita di rumah tangga miskin yang telah mendapat imunisasi di Kabupaten Soppeng sebesar 81,84 persen. Hal ini menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai kabupaten dengan persentase balita yang telah mendapat imunisasi dapat dikatakan masih relative rendah jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 4 Persentase Perempuan berstatus Miskin yang Menggunakan Alat KB di Kabupaten Soppeng 2013-2017

Pada Gambar 4 terlihat bahwa dari tahun 2013-2017 persentase perempuan berstatus miskin usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB mengalami kenaikan. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2016, persentasenya kembali naik pada tahun 2017 yaitu mencapai angka 62,09 persen.

### 3.2.4 Pengeluaran Per Kapita

Makanan telah dijadikan indikator oleh ahli ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seperti Ernest Engel, yang dikenal dengan hukum Engel, menyebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka proporsi pengeluaran masyarakat untuk makanan semakin kecil. Dengan kata lain, seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk non-makanan. Pergeseran

komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah. Dengan demikian, pangsa (*share*) pengeluaran makanan rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat. Sehingga pangsa (dalam %) pengeluaran untuk makanan semakin kecil, maka tingkat kemakmuran masyarakat dikatakan makin membaik (Trisnowati dan Budiwinarto, 2013).

Berdasarkan teori di atas, maka kemakmuran masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Soppeng masih bisa ditingkatkan lagi. Hal tersebut bisa dilihat dari pengeluaran penduduk di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selain Kota Makassar masih didominasi oleh pengeluaran untuk membiayai makanan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase pengeluaran perkapita untuk makanan baik penduduk miskin maupun tidak miskin masih di atas 50 persen, hanya Kota Makassar saja yang persentasenya dibawah 50 persen (lihat Tabel 5).

Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan status miskin penduduk di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa persentase pengeluaran perkapita untuk makanan penduduk yang tergolong miskin lebih besar daripada penduduk tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin lebih memprioritaskan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dibandingkan bukan makanan.

Begitu juga dengan Kabupaten Soppeng, sebanyak 58,72 persen pengeluaran perkapita penduduk miskin di Kabupaten Soppeng, masih digunakan untuk membiayai komoditi makanan. Sedangkan pengeluaran perkapita untuk makanan penduduk tidak miskin di Kabupaten Soppeng sebesar 57,04 persen.



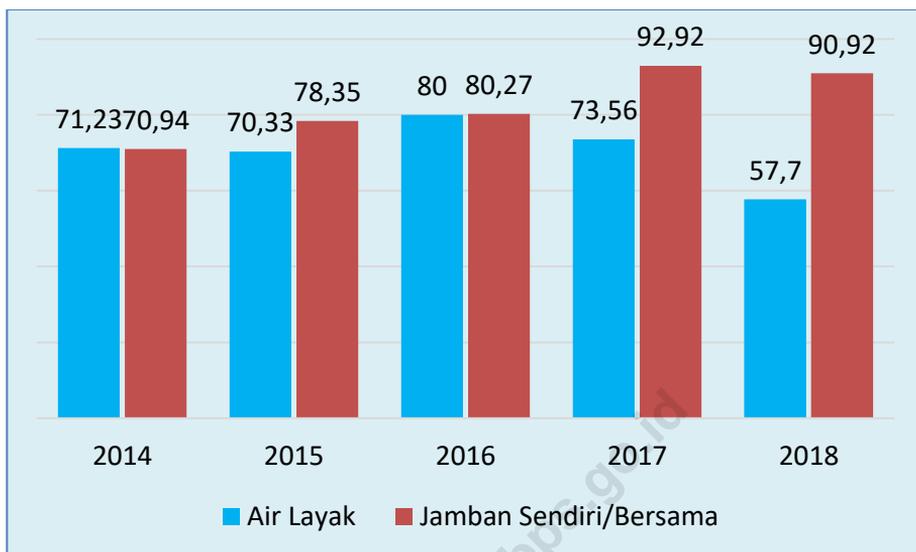
Gambar 5 Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

Seperti ditunjukkan pada Gambar 5, persentase pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Soppeng baik yang tergolong miskin maupun tidak miskin masih didominasi oleh pengeluaran untuk makanan. Pada tahun 2017, angkanya mengalami penurunan dari 60,65 persen menjadi 59,83 persen. Kemudian pada tahun 2018, persentase pengeluaran perkapita untuk makanan penduduk Kabupaten Soppeng mengalami penurunan lagi, baik yang tergolong miskin maupun tidak miskin. Pada penduduk yang tergolong miskin persentasenya menjadi 58,72 persen dan pada penduduk yang tergolong tidak miskin persentasenya menjadi 57,04 persen.

### 3.2.5. Fasilitas Perumahan

Kondisi perumahan dan akses infrastruktur publik akan berdampak luas terhadap pengembangan potensi dan produktivitas penduduk miskin. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan melihat fasilitas jamban sendiri/bersama dan akses terhadap air bersih (Rusastra dan Napitupulu, 2008).

Dalam hal kelengkapan fasilitas rumah yang dilihat dari ketersediaan air layak Kabupaten Soppeng termasuk kabupaten yang masih dibawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 57,70 persen rumah tangga miskin yang dapat menyediakan air layak minum bagi anggota rumah tangganya. Persentase ini masih di bawah rata-rata persentase Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 68,40 persen. Jika dilihat dari penggunaan jamban di Kabupaten sudah cukup baik. Terdapat 90,92 persen rumah tangga miskin yang mempunyai fasilitas jamban. Angka ini sudah di atas rata-rata persentase Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 74,58 persen (lihat Tabel 6).



Gambar 6 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

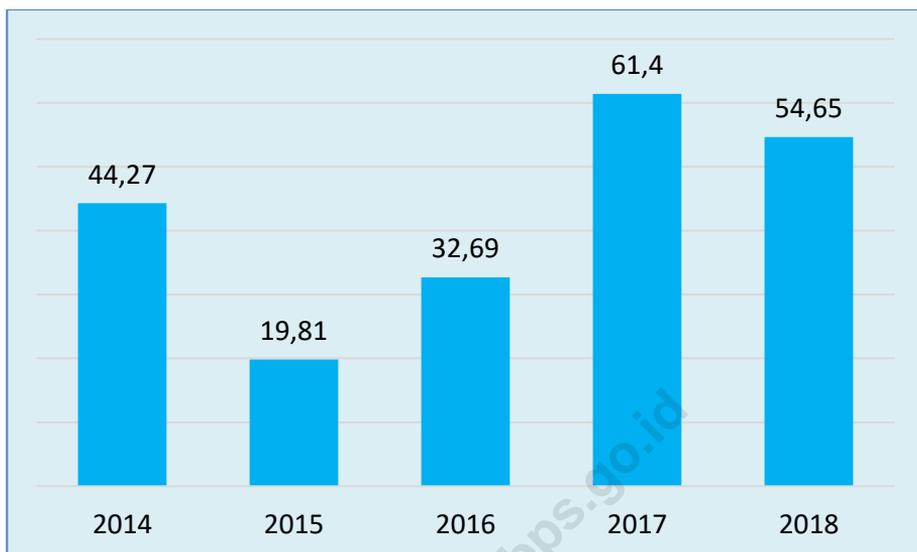
Jika dilihat pada periode tahun 2014-2018 seperti yang terlihat pada Gambar 6 maka dapat diketahui bahwa baik penggunaan air layak dan fasilitas jamban oleh rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng sempat mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2018, angka persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri maupun Bersama di Kabupaten Soppeng jumlahnya mencapai 90,92 persen. Sedangkan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri atau bersama dari tahun 2014 sampai tahun 2017, angkanya selalu mengalami kenaikan dan pada tahun 2017 menjadi 92,92 persen.

Haughton dan Khander (2009) mengatakan kelengkapan fasilitas rumah tangga seperti akses terhadap air layak dan sanitasi akan berpengaruh pada kesehatan anggota rumah tangga, yang merupakan

salah satu faktor penyebab kemiskinan yang dilihat dari karakteristik sosial rumah tangga. Peningkatan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak dan jamban sendiri/bersama selama 4 tahun terakhir merupakan modal yang bagus dalam upaya perbaikan pola hidup sehat dalam rumah tangga miskin. Hal ini perlu didukung oleh pemerintah Kabupaten Soppeng. Walaupun persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak dan jamban sendiri/bersama di Kabupaten Soppeng masih di bawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kabupaten Soppeng perlu terus mengupayakan untuk meningkatkan pengadaan maupun pelayanan kedua fasilitas tersebut.

### **3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan**

Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 54,65 persen rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng yang menerima bantuan raskin dengan gratis. Setiap rumah tangga miskin penerima raskin mendapat rata-rata 12,37 kg. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan lainnya, Kabupaten Soppeng berada dalam urutan ke-10 dengan persentase rumah tangga miskin penerima raskin terkecil. (lihat Tabel 7).



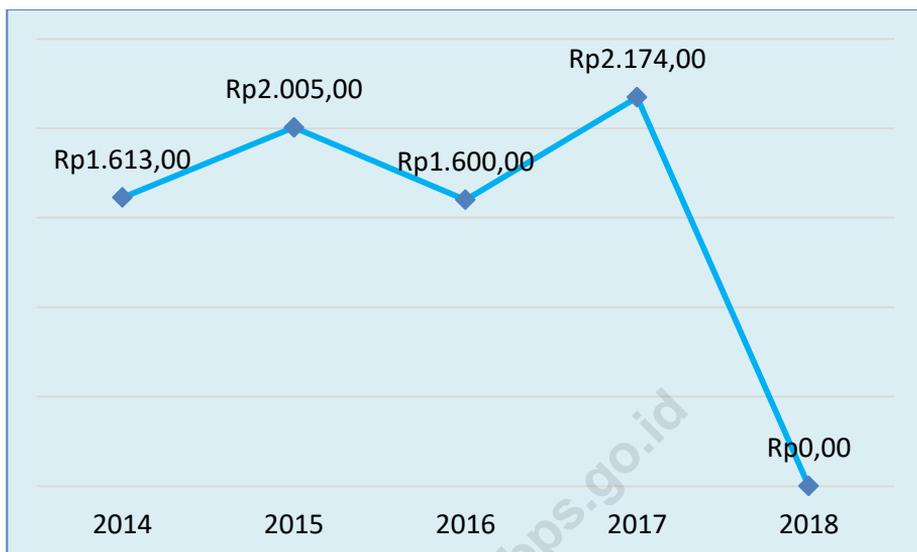
Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

Pada Gambar 7.1, dapat dikatakan bahwa persentase rumah tangga miskin penerima raskin di Kabupaten Soppeng sejak tahun 2015 mengalami trend yang menaik, walaupun pada tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan. Dan pada tahun 2018, terjadi penurunan lagi, yaitu dari 61,40 persen menjadi 54,65 persen.



Gambar 7.2 Persentase Rata-rata Jumlah Beras Raskin (kg) yang Dibeli oleh Rumah tangga Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

Apabila dilihat dari Gambar 7.2, dapat diketahui bahwa persentase rata-rata jumlah beras raskin yang dibeli oleh rumah tangga miskin dari tahun 2014-2017 selalu mengalami penurunan. Kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2018, persentase rata-rata jumlah raskin yang dibeli menjadi 12,37 persen.



Gambar 7.3 Rata-rata Harga Beras Raskin yang Dibeli oleh Rumah tangga Miskin di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

Dari Gambar 7.3 dapat diketahui bahwa rata-rata harga raskin yang dibeli oleh rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng, selama tahun 2014-2018 fluktuatif. Harga tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2017 dengan harga mencapai Rp 2.174,00.



• Pada tahun 2017,  
di Kabupaten  
Soppeng  
terdapat  
**62,09%**

perempuan berstatus miskin usia  
15-49 tahun yang **menggunakan  
alat KB**

<https://soppengkab.bps.go.id>

## BAB IV

# PENUTUP

Pada tahun 2018 masih ada sekitar 16.995 jiwa atau sekitar 7,50 persen penduduk Kabupaten Soppeng yang tergolong miskin. Jika dilihat dari periode tahun 2014-2018, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 18.763 orang menjadi 16.995 orang. Pada periode tahun tersebut, angka persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 8,29 persen menjadi 7,50 persen.

Angka indeks ketimpangan kemiskinan Kabupaten Soppeng pada periode tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai angka 1,39 persen pada tahun 2018. Ini berarti bahwa kesenjangan antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan relatif kecil, yaitu hanya sebesar 1,39 persen. Begitu pula dengan indeks  $P_2$  yang juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun 2018 mencapai angka 0,37 persen. Nilai ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin tidak begitu timpang.

Profil rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2018 yang memiliki keterkaitan dengan konsep kemiskinan secara konseptual, antara lain:

- a. Tingkat pendidikan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD atau tidak bersekolah, yaitu sebesar 46,53 persen.

- b. Ada sebanyak 92,68 persen penduduk miskin yang berumur 15-55 tahun sudah bisa membaca dan menulis aksara tertentu. Sedangkan penduduk miskin pada kelompok umur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis aksara tertentu ada sebanyak 90,17.
- c. Pada tahun 2018, Angka partisipasi sekolah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng yang berumur 7-12 tahun atau usia sekolah dasar mencapai 100 persen, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi sekolah penduduk miskin berumur 13-15 tahun atau usia sekolah menengah pertama yang hanya 82,34 persen.
- d. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja atau pengangguran di Kabupaten Soppeng dari tahun 2014-2018 terlihat bernilai fluktuatif, dan pada tahun 2018 terjadi kenaikan, menjadi 44,18 persen.
- e. Pada tahun 2017 di Kabupaten Soppeng, terdapat 62,09 persen perempuan berstatus miskin usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB pada tahun 2018.
- f. Sebanyak 58,72 persen pengeluaran perkapita penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada tahun 2018, masih digunakan untuk membiayai komoditi makanan. Sedangkan pengeluaran perkapita untuk makanan penduduk tidak miskin di Kabupaten Soppeng sebesar 57,04 persen.
- g. Pada tahun 2018, di Kabupaten Soppeng terdapat sebanyak 57,70 persen rumah tangga miskin yang dapat menyediakan air layak minum bagi anggota rumah tangganya dan terdapat 90,92 persen rumah tangga miskin yang mempunyai fasilitas jamban sendiri/bersama.
- h. Pada tahun 2018 terdapat 54,65 persen rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng yang menerima bantuan raskin dengan gratis. Setiap rumah tangga miskin penerima raskin mendapat rata-rata 12,37 kg.

Pada tahun 2018,  
di Kabupaten Soppeng  
terdapat **54,65%**

rumah tangga miskin  
yang menerima raskin  
dengan rata-rata

sebanyak **12,37** kg



<https://soppengkab.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2007). *Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2019). *Data dan Informasi Kemiskinan Sulawesi Selatan 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. (2019). *Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2019*. Soppeng: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng.
- Cahyo, Agus Dwi. (2017). *Peran Jarak Migrasi pada Model Pengaruh Karakteristik Demografi, Ekonomi, dan Sosial terhadap Kemiskinan*

*Rumah Tangga Migran yang Tinggal di Daerah Perkotaan di Indonesia*  
[Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.

Detik.com

Flaticon.com

Freepik.com

Haughton, Jonathan dan Khandker, Shahidur R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. Washington DC: World Bank.

Irawan, Puguh Bodro, et al. (2017). *Official Statistics Sosial-Kependudukan Dasar*. Bogor: In Media.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 78. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rusastra, I Wayan dan Napitupulu, Togar A. (2007). *Karakteristik Wilayah dan Keluarga Miskin di Perdesaan: Basis Perumusan Intervensi Kebijakan*. Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian : 9-22.

Suryawati, Chriswardani. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).

Trisnowati, Juni dan Budiwinarto, Kim. (2013). *Kajian Pengaruh Harga dan Pendapatan terhadap Proporsi Pengeluaran Makanan Rumah Tangga (Pendekatan Model Linier Permintaan Lengkap)*. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Diponegoro : 123-134.

Wijayanto, Ravi Dwi. (2010). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2008* [Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.

# LAMPIRAN TABEL

<https://sopriangkab.bps.go.id>

**Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin,  $P_1$ ,  $P_2$ , dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018**

No	Kabupaten	Jml Penduduk Miskin (000)	$P_0$	$P_1$	$P_2$	Garis Kemiskinan (Rp/Kap /Bln)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kepulauan Selayar	17,59	13,13	2,82	0,89	348 608
2	Bulukumba	31,25	7,48	1,06	0,23	310 7753
3	Bantaeng	17,20	9,23	1,74	0,52	260 263
4	Jeneponto	55,95	15,48	2,63	0,60	356 319
5	Takalar	26,57	9,00	1,61	0,39	335 989
6	Gowa	59,34	7,83	1,25	0,31	365 503
7	Sinjai	22,48	9,28	1,18	0,24	281 301
8	Maros	35,97	10,31	2,19	0,71	376 749
9	Pangkajene Dan Kepulauan	50,12	15,10	3,12	0,92	300 219
10	Barru	15,68	9,04	1,58	0,37	307 904
11	Bone	79,57	10,55	1,44	0,30	309 076
12	Soppeng	17,00	7,50	1,39	0,37	253 457
13	Wajo	29,73	7,50	1,24	0,30	297 121
14	Sidenreng Rappang	15,41	5,16	0,94	0,23	299 332
15	Pinrang	32,94	8,81	1,16	0,26	280 746
16	Enrekang	25,53	12,49	1,84	0,42	312 674
17	Luwu	47,91	13,36	2,35	0,55	305 722
18	Tana Toraja	29,65	12,75	2,27	0,55	299 570
19	Luwu Utara	42,43	13,69	2,43	0,67	329 967
20	Luwu Timur	21,15	7,23	1,16	0,28	315 478
21	Toraja Utara	30,68	13,37	1,59	0,30	309 806
22	Kota Makassar	66,22	4,41	1,11	0,38	386 545
23	Kota Parepare	8,01	5,59	0,75	0,17	308 337
24	Kota Palopo	14,27	7,94	1,14	0,26	292 602
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>792,64</b>	<b>9,06</b>	<b>1,55</b>	<b>0,38</b>	<b>306,545</b>

**Tabel 2** **Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Golongan Umur di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018**

No	Kabupaten/Kota	Pendidikan yang Ditamatkan			AMH		APS	
		<SD	Tamat SD/SLTP	SLTA+	15-24 th	15-55 th	7-12 th	13-15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kepulauan Selayar	40,81	40,00	19,19	100,00	91,97	98,45	100,00
2	Bulukumba	49,29	41,10	9,61	100,00	86,00	100,00	54,52
3	Bantaeng	73,09	26,52	0,40	100,00	78,00	95,15	82,43
4	Jeneponto	51,44	34,98	13,58	99,32	91,71	100,00	97,19
5	Takalar	41,48	49,01	9,51	100,00	85,84	100,00	61,15
6	Gowa	38,22	46,88	14,90	100,00	89,81	100,00	94,35
7	Sinjai	44,40	48,67	6,93	96,52	97,47	100,00	64,85
8	Maros	43,75	42,82	13,44	93,28	92,24	100,00	93,75
9	Pangkajene dan Kepulauan	34,07	50,54	15,39	98,13	94,06	100,00	87,62
10	Barru	34,41	50,82	14,77	100,00	96,48	100,00	85,59
11	Bone	40,71	47,91	11,38	100,00	91,15	95,26	96,34
12	Soppeng	46,53	45,78	7,68	90,17	92,68	100,00	82,34
13	Wajo	39,01	50,41	10,58	100,00	94,79	100,00	83,02
14	Sidenreng Rappang	50,96	42,71	6,33	100,00	91,50	100,00	100,00
15	Pinrang	27,87	67,16	4,97	100,00	95,47	98,01	89,37
16	Enrekang	29,72	49,17	21,11	100,00	94,29	97,51	92,01
17	Luwu	32,73	48,39	18,87	96,83	95,99	98,71	70,67
18	Tana Toraja	35,08	44,15	20,77	100,00	91,06	98,79	94,79
19	Luwu Utara	31,18	57,24	11,58	100,00	96,34	100,00	94,83
20	Luwu Timur	26,79	44,35	28,86	100,00	99,39	100,00	100,00
21	Toraja Utara	40,45	45,16	14,39	100,00	90,36	96,21	97,93
22	Kota Makassar	25,55	48,49	25,96	100,00	96,17	100,00	89,41
23	Kota Parepare	34,87	39,63	25,50	100,00	99,94	93,22	87,21
24	Kota Palopo	13,08	47,40	39,52	84,53	95,92	100,00	100,00
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>38,41</b>	<b>46,81</b>	<b>14,79</b>	<b>98,63</b>	<b>92,77</b>	<b>98,85</b>	<b>89,02</b>

**Tabel 3**      **Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Sektor Bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018**

No	Kabupaten/Kota	Status Bekerja			Sektor Bekerja		
		Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kepulauan Selayar	45,19	44,84	9,96	45,19	24,31	30,50
2	Bulukumba	52,89	31,94	15,17	52,89	27,30	19,82
3	Bantaeng	29,77	47,81	22,43	29,77	31,81	38,43
4	Jeneponto	35,67	53,77	10,56	35,67	40,25	24,08
5	Takalar	49,84	32,85	17,30	49,84	8,78	41,37
6	Gowa	47,42	40,30	12,28	47,42	16,59	35,99
7	Sinjai	38,40	53,99	7,61	38,40	11,53	50,07
8	Maros	44,79	43,21	12,01	44,79	26,20	29,02
9	Pangkajene dan Kepulauan	54,70	25,27	20,03	54,70	6,13	39,17
10	Barru	50,51	42,03	7,46	50,51	27,73	21,76
11	Bone	43,70	48,35	7,95	43,70	26,39	29,91
12	Soppeng	44,18	41,61	12,20	44,18	27,07	28,75
13	Wajo	52,90	39,25	7,85	52,90	18,41	28,70
14	Sidenreng Rappang	53,79	33,33	12,88	53,79	14,19	32,02
15	Pinrang	40,86	39,12	20,03	40,86	18,19	40,95
16	Enrekang	37,58	57,07	5,34	37,58	20,74	41,68
17	Luwu	46,63	39,77	13,60	46,63	20,75	32,62
18	Tana Toraja	32,77	62,79	4,44	32,77	28,78	38,45
19	Luwu Utara	41,72	49,68	8,60	41,72	25,48	32,80
20	Luwu Timur	46,16	39,74	14,10	46,16	13,98	39,86
21	Toraja Utara	27,66	53,68	18,66	27,66	26,13	46,22
22	Kota Makassar	52,94	16,36	30,70	52,94	2,33	44,73
23	Kota Parepare	53,01	30,79	16,20	53,01	0,28	46,71
24	Kota Palopo	59,56	17,59	22,86	59,56	5,35	35,09
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>45,08</b>	<b>41,00</b>	<b>13,92</b>	<b>45,08</b>	<b>20,32</b>	<b>34,60</b>

**Tabel 4**            **Persentase Perempuan berstatus Miskin Usia 15-49 Tahun yang Menggunakan Alat KB dan Balita di Rumah Tangga Miskin yang telah Diimunisasi di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017**

No	Kabupaten/Kota	Pengguna Alat KB	Balita yang Telah Diimunisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Selayar	66,43	91,52
2	Bulukumba	68,68	64,71
3	Bantaeng	67,06	65,5
4	Jeneponto	76,71	81,69
5	Takalar	78,08	95,22
6	Gowa	78,01	68,72
7	Sinjai	80,08	73,66
8	Maros	71,64	86,75
9	Pangkajene dan Kepulauan	71,75	77,08
10	Barru	43,91	100
11	Bone	60,41	83,89
12	Soppeng	62,09	81,84
13	Wajo	65,29	100
14	Sidenreng Rappang	70,07	94,22
15	Pinrang	71,08	81,71
16	Enrekang	73,61	99,63
17	Luwu	56,74	81,29
18	Tana Toraja	70,85	100
19	Luwu Utara	76,79	98,98
20	Luwu Timur	68,54	100
21	Toraja Utara	68,58	90,19
22	Kota Makassar	67,15	91,28
23	Kota Parepare	35,97	92,43
24	Kota Palopo	38,1	91,53
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>68,14</b>	<b>85,06</b>

**Tabel 5**                    **Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan Menurut Status Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018**

No	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	61,82	59,85	60,11
2	Bulukumba	68,22	58,93	59,83
3	Bantaeng	62,82	55,43	56,11
4	Jeneponto	63,42	58,16	58,97
5	Takalar	59,24	53,10	53,65
6	Gowa	61,04	52,74	53,39
7	Sinjai	59,08	54,73	55,13
8	Maros	56,72	53,24	53,60
9	Pangkajene dan Kepulauan	61,65	55,19	56,16
10	Barru	53,44	52,35	52,45
11	Bone	59,29	53,45	54,07
12	Soppeng	58,72	57,04	57,16
13	Wajo	64,22	54,88	55,58
14	Sidenreng Rappang	60,53	57,75	57,90
15	Pinrang	62,94	57,14	57,65
16	Enrekang	62,00	56,52	57,20
17	Luwu	61,21	56,73	57,73
18	Tana Toraja	62,19	58,30	58,80
19	Luwu Utara	55,99	54,43	54,64
20	Luwu Timur	55,01	53,11	53,25
21	Toraja Utara	64,98	55,36	56,65
22	Kota Makassar	62,29	49,14	49,72
23	Kota Parepare	57,28	50,63	51,01
24	Kota Palopo	61,14	51,82	52,56
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>60,96</b>	<b>54,03</b>	<b>54,65</b>

**Tabel 6**                    **Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018**

No	Kabupaten/Kota	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepulauan Selayar	77,84	34,07
2	Bulukumba	68,51	81,00
3	Bantaeng	76,39	58,40
4	Jeneponto	96,51	68,85
5	Takalar	84,15	76,45
6	Gowa	63,64	81,63
7	Sinjai	76,49	71,33
8	Maros	64,41	69,69
9	Pangkajene dan Kepulauan	77,71	61,36
10	Barru	61,68	87,39
11	Bone	77,77	84,05
12	Soppeng	57,70	90,92
13	Wajo	70,50	70,03
14	Sidenreng Rappang	58,35	76,72
15	Pinrang	54,69	74,59
16	Enrekang	34,79	56,32
17	Luwu	48,91	56,70
18	Tana Toraja	30,15	76,40
19	Luwu Utara	60,29	85,44
20	Luwu Timur	53,43	76,90
21	Toraja Utara	42,23	95,73
22	Kota Makassar	93,73	79,66
23	Kota Parepare	72,74	82,80
24	Kota Palopo	78,07	98,40
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>68,40</b>	<b>74,58</b>

**Tabel 7**            **Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Membeli Beras Raskin, Rata-rata Jumlah Beras Raskin dan Rata-rata Harga Pembelian Raskin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018**

No	Kabupaten/Kota	Ruta Miskin Penerima Raskin (%)	Rata-Rata Raskin (kg)	Rata-Rata Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepulauan Selayar	75,62	20,71	1 465
2	Bulukumba	51,03	15,40	1 499
3	Bantaeng	54,79	9,68	869
4	Jeneponto	82,26	6,99	1 265
5	Takalar	70,73	10,24	799
6	Gowa	56,06	13,71	2 063
7	Sinjai	52,95	19,16	1 624
8	Maros	56,79	13,34	625
9	Pangkajene dan Kepulauan	68,37	12,36	1 123
10	Barru	44,46	13,87	81
11	Bone	55,79	14,61	1 058
12	Soppeng	54,65	12,37	-
13	Wajo	41,63	12,13	960
14	Sidenreng Rappang	46,61	15,22	504
15	Pinrang	60,64	10,06	1 081
16	Enrekang	78,38	11,58	1 731
17	Luwu	69,47	14,13	922
18	Tana Toraja	63,57	16,04	991
19	Luwu Utara	35,30	12,95	634
20	Luwu Timur	34,47	14,86	808
21	Toraja Utara	57,35	12,35	580
22	Kota Makassar	-	n.a	n.a
23	Kota Parepare	73,09	13,68	-
24	Kota Palopo	40,50	14,76	-
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>54,89</b>	<b>12,87</b>	<b>1 088</b>

<https://soppengkab.bps.go.id>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://soppengkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SOPPENG**

Jl. Salotungo samping kantor bupati, Watansoppeng

Email: [soppengkab@bps.go.id](mailto:soppengkab@bps.go.id)

Homepage: <https://soppengkab.bps.go.id>